



# **LAPORAN KINERJA**

**SEKRETARIAT  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENDIDIKAN VOKASI  
TAHUN 2020**



**LAPORAN KINERJA  
SEKRETARIAT  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENDIDIKAN VOKASI  
TAHUN 2020**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI  
TAHUN 2020**



## *Kata Pengantar*

**P**uji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2020 telah berhasil diselesaikan dengan tepat waktu.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahunnya.

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi pada tahun 2020 telah menetapkan sasaran dan indikator kinerja. Meskipun Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi telah ada sejak awal tahun 2020, namun anggaran untuk mendukung pelaksanaan program baru terbit DIPA-nya pada bulan Mei 2020. Secara umum Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sampai dengan tahun 2020 sudah mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Berbagai kegiatan telah dilaksanakan sebagai strategi dalam merealisasikan target kinerja sampai dengan akhir tahun 2020, yang mana dalam pelaksanaannya tidak lepas dari adanya permasalahan yang perlu ditindaklanjuti. Permasalahan tersebut diantaranya perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kemendikbud, pandemi covid-19, dan berbagai permasalahan administratif lainnya yang berimbas pada lambatnya pelaksanaan kegiatan. Akan tetapi, dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera mendapatkan solusi sebagai perbaikan dalam merealisasikan target kinerja.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerja sampai dengan akhir tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi pada tahun 2020. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang Pendidikan vokasi serta peningkatan kinerja pada tahun mendatang.



Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2020 ini.

Jakarta, Januari 2021  
Sekretaris

**Dr. Henri Tambunan**  
NIP. 196811261994031001





## *Daftar Isi*

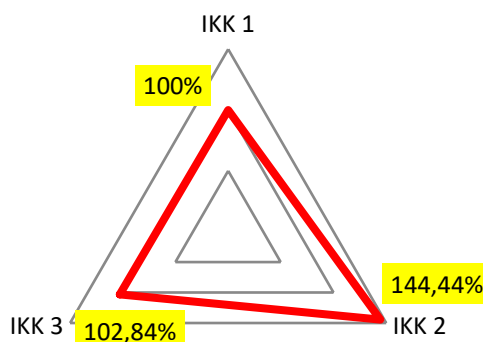
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Gambaran Umum.....	1
B. Dasar Hukum .....	3
C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi .....	4
D. Isu-Isu Strategis/Permasalahan Utama .....	9
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>11</b>
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>17</b>
A. Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.....	17
B. Realisasi Anggaran .....	40
<b>BAB IV    PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Dokumen Pengukuran Kinerja	
2. Dokumen Perjanjian Kinerja Awal	
3. Dokumen Perjanjian Kinerja Akhir	
4. Surat Pernyataan Telah Direviu	



## Rehtisan Eksekutif

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2020 menyajikan tingkat pencapaian 1 (satu) sasaran kegiatan dengan 3 (tiga) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 antara Sekretaris Ditjen Pendidikan Vokasi dengan Dirjen Pendidikan Vokasi. Tingkat ketercapaian lebih detail akan diuraikan pada Bab III.

Secara umum, capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sampai Tahun 2020 didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan, yaitu 1) Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB; 2) Jumlah Satker yang dibina menuju WBK sebanyak 9 Satker; dan 3) Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93. Kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut perealisasiannya didukung oleh kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi. Setelah diukur, realisasi anggaran mencapai 94,74% dan pencapaian target kinerjanya sudah terealisasi dengan persentase seperti terlihat pada gambar di bawah.



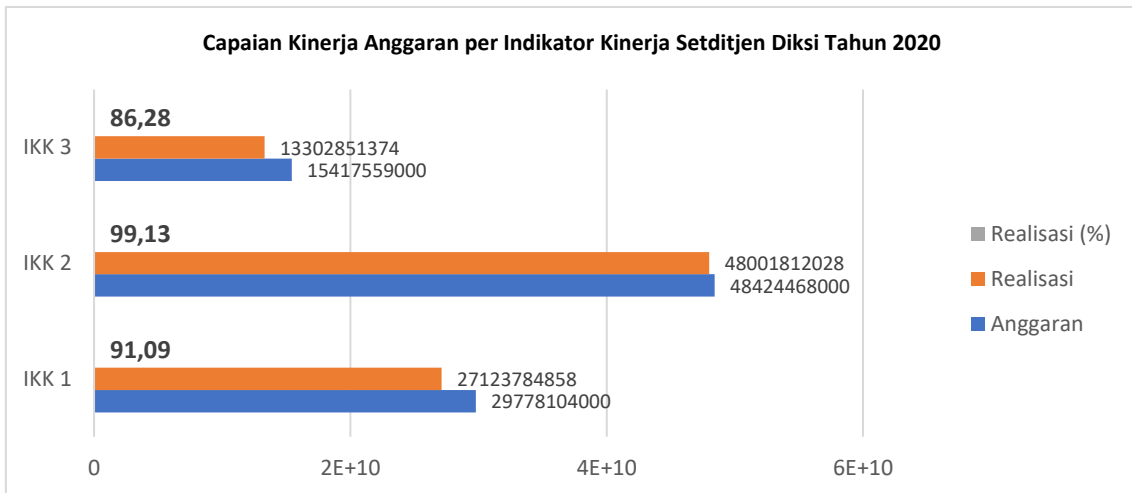
Gambar 1 Persentase Capaian Indikator Kinerja Setditjen Pendidikan Vokasi

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Setditjen Pendidikan Vokasi

Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi		Target	Realisasi	%
<b>IKK 1</b>	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB	BB	100%
<b>IKK 2</b>	Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	9	13	144,44%
<b>IKK 3</b>	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	93	95,64	102,84%

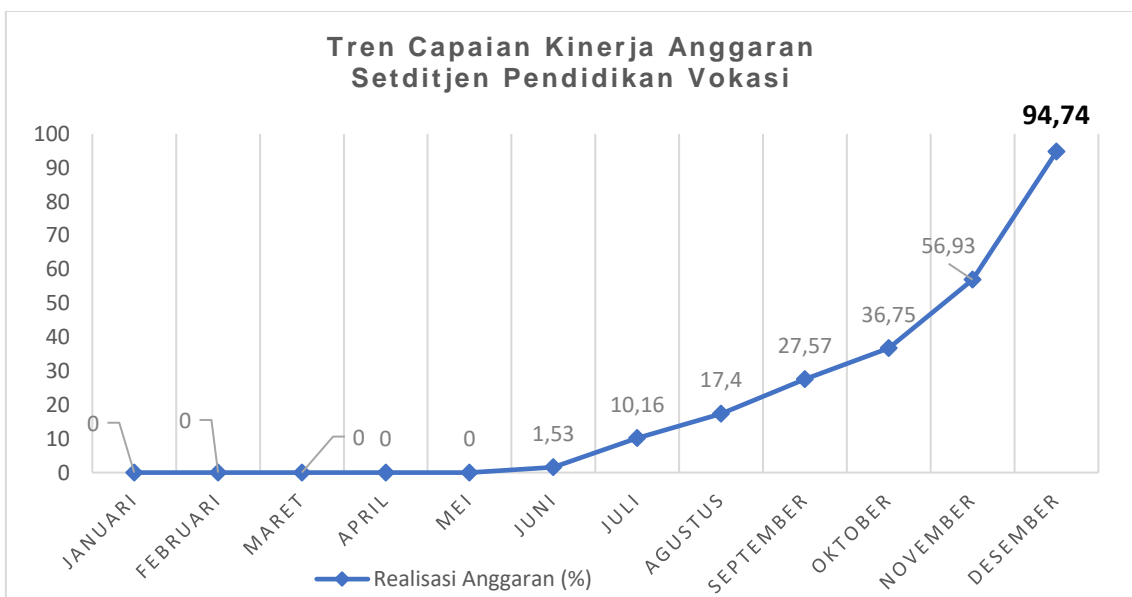


Capaian pelaksanaan anggaran Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi secara keseluruhan sampai pada tahun 2020 sebesar Rp 144.360.404.029,00 atau sebesar 94,74% (Berdasarkan hasil dari aplikasi Monitoring Laporan Keuangan/ MoLK pada tanggal 15 Januari 2021). Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada grafik di bawah ini:



**Gambar 2**

*Capaian Anggaran per Indikator Kinerja Setditjen Diksi Tahun 2020*



**Gambar 3**

*Tren Capaian Kinerja Anggaran Setditjen Pendidikan Vokasi*

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:



1. Perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kemendikbud, terutama di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sebagai unit utama baru di Kemendikbud;
2. DIPA Setditjen Pendidikan Vokasi yang baru terbit pada pertengahan bulan Mei 2020;
3. Kondisi Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia yang berimbas pada pelaksanaan kegiatan;
4. Pembenahan sistem dan prosedur kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sebagai unit utama baru di lingkungan Kemendikbud;
5. Pemanfaatan dan penempatan SDM serta koordinasi antar Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Terus berkoordinasi antar Satuan Kerja yang berkaitan dengan perubahan tata kerja/prosedur kerja dan pemanfaatan SDM;
2. Memaksimalkan SDM yang ada dan berkoordinasi serta berkolaborasi antar Bidang dalam pelaksanaan program;
3. Mempercepat proses penyerapan anggaran dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan secara parallel;
4. Melaksanakan berbagai kegiatan dengan mixing tatap muka maupun secara daring;
5. Mendorong realisasi pengadaan belanja modal untuk mendongkrak daya serap;
6. Melakukan proses pengadaan dengan lelang/lelang cepat.





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas: a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi; b) Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan; c) Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi; d) Direktorat Kursus dan Pelatihan; dan e) Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri.

Baik Satker pusat maupun satker daerah di lingkungan Direktorat jenderal Pendidikan Vokasi bersama-sama mendukung kebijakan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi yang menggaungkan *Link and Match* yang merupakan kebijakan lama namun dimunculkan dengan nama baru supaya lebih mudah diingat, yaitu Paket Pernikahan Massal. Kebijakan tersebut diusung dengan metoda baru tetapi tetap sesuai dengan arahan dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK dan berinisiatif menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Adapun tujuan kebijakan tersebut adalah untuk meningkatkan keterserapan lulusan pendidikan vokasi di dunia usaha dan dunia industri.

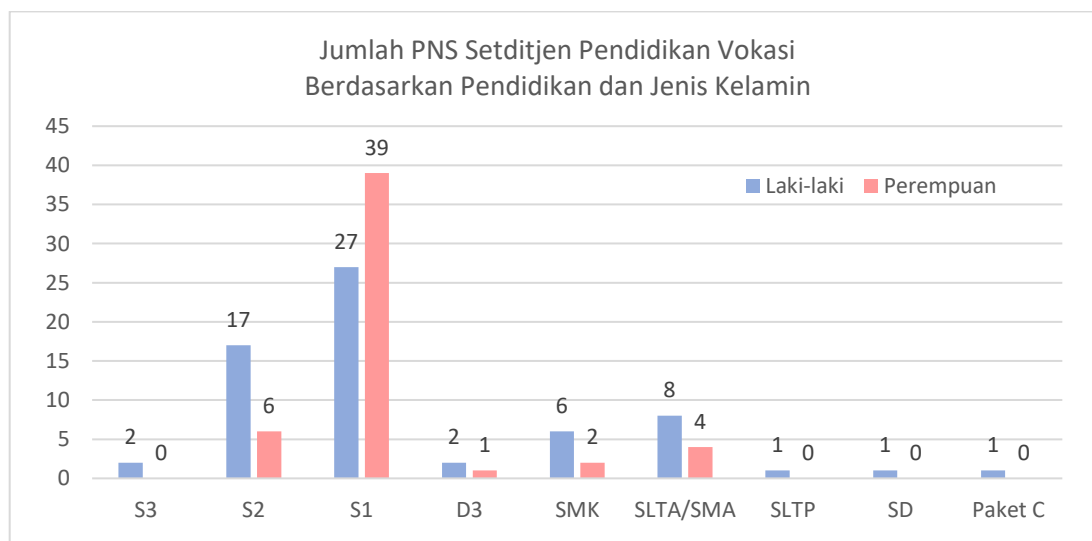
Melalui Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Pendidikan Vokasi, telah disusun *roadmap* dalam merancang dan menetapkan arah kebijakan, program, kegiatan, output dan outcome Ditjen Pendidikan Vokasi dalam kurun waktu 2020-2024. Renstra tersebut menjadi pedoman dalam melaksanakan program, arah dan kebijakan Ditjen Pendidikan Vokasi dengan mengoptimalkan manajemen yang akuntabel, efektif dan efisien.

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi telah melakukan penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang kemudian mengalami perubahan dengan bergabungnya 7 (tujuh) P4TK yang saat ini menjadi Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) yang terdiri atas BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata, BBPPMPV Pertanian, BBPPMPV Bidang Mesin dan Teknik Industri, BBPPMPV Bidang Bangunan dan Listrik, BPPMPV Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, BBPPMPV Seni dan Budaya, dan BBPPMPV Bidang Otomotif dan Elektronika. Hal tersebut membawa perubahan

pada IKU dan IKK Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi baik untuk satker pusat maupun satker daerah di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Sebagai salah satu satker pusat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi juga mendukung terwujudnya kebijakan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dengan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menyelenggarakan fungsinya dengan didukung oleh 1 Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi dalam 4 Bidang: Bidang Data, Program, dan Pelaporan; Bidang Keuangan dan Barang Milik Negara; Bidang Hukum dan Tatalaksana; serta Bidang Pelayanan Umum dan Kerja Sama. Sementara itu, Jumlah Sumber Daya Manusia di Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sebanyak 118 PNS. Dengan rincian 66 PNS Laki-laki dan 52 PNS Perempuan.



**Gambar 4**

*Jumlah PNS Setditjen Pendidikan Vokasi Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin*



Salah satu fungsi yang diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yaitu koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan tinggi vokasi dan profesi, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja yang tertuang dalam bentuk Laporan Kinerja. Selain menyusun Laporan Kinerja untuk Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, sebagai Satuan Kerja, Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi juga diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi tersebut disusun sebagai akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi atas penggunaan anggaran pada tahun 2020 yang berkaitan dengan hasil pengukuran kinerja atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran 2020.

Penyusunan Laporan Kinerja dilaksanakan secara optimal untuk memenuhi setiap komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) sesuai Perpres Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014. SAKIP menunjukkan bagaimana tata kelola setiap instansi pemerintah berjalan. Akuntabilitas kinerja menggambarkan kemampuan suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dan digunakan dalam melakukan pembangunan.

## **B. Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2020 berdasar pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. PemenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;



7. Permendikbud Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
13. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2020-2024.

### **C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 117 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan disebutkan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Setditjen Diksi) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal serta urusan ketatausahaan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 tersebut Setditjen Pendidikan Vokasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan tinggi vokasi dan profesi, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;



- b. pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan tinggi vokasi dan profesi, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan tinggi vokasi dan profesi, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan Direktorat Jenderal;
- e. penyusunan bahan peraturan perundang-undangan dan penelaahan dan fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal;
- h. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan tinggi vokasi dan profesi, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- i. pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- j. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan tinggi vokasi dan profesi, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Jenderal.

Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional, dimana Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

#### **1. Subbagian Tata Usaha**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Jenderal.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Subbagian Tata Usaha Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program kerja Sekretariat Direktorat Jenderal;





- b. Melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal;
- c. Melakukan revisi rencana, program, kegiatan, dan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal;
- d. Melakukan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal;
- e. Melakukan urusan pencairan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal;
- f. Melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran belanja lainnya di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal;
- g. Melakukan penelitian dan pengujian bukti dan/atau dokumen penerimaan dan pengeluaran keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal;
- h. Melakukan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal;
- i. Melakukan penyiapan bahan penyelesaian tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti kerugian Sekretariat Direktorat Jenderal;
- j. Melakukan penyiapan bahan usul pejabat perbendaharaan Sekretariat Direktorat Jenderal;
- k. Melakukan penyiapan bahan usul penghentian pembayaran gaji pegawai yang pensiun, berhenti, dan meninggal dunia di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal;
- l. Melakukan penyusunan laporan keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal;
- m. Melakukan penyiapan bahan formasi dan rencana pengembangan pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal;
- n. Melakukan penempatan, kepangkatan, pemindahan pegawai, dan mutasi lainnya di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal;
- o. Melakukan penyiapan bahan usul penilaian angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal;
- p. Melakukan penyusunan data dan informasi kepegawaian, urusan administrasi penilaian prestasi/kinerja pegawai, dan administrasi kepegawaian lainnya di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal;
- q. Melakukan penyiapan bahan usul pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, dan tugas/izin belajar di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal;



- r. Melakukan urusan pembuatan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pensiun, tabungan perumahan, pemeriksaan kesehatan pegawai, dan dokumen kepegawaian lainnya di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal;
- s. Melakukan urusan penegakan disiplin dan usul pemberian penghargaan pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal;
- t. Melakukan urusan pemberian cuti pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal;
- u. Melakukan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal;
- v. Melakukan penyusunan rekapitulasi LHKPN dan LHKASN di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal;
- w. Melakukan analisis dan usul penyempurnaan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal;
- x. Melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan penyusunan peta jabatan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal;
- y. Melakukan penyusunan sistem dan prosedur dan standar pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal;
- z. Melakukan penyiapan bahan kerja sama, hubungan masyarakat, dan publikasi Sekretariat Direktorat Jenderal;
- aa. Melakukan penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar Sekretariat Direktorat Jenderal;
- bb. Melakukan penataan, pemeliharaan, dan usul penghapusan arsip Sekretariat Direktorat Jenderal;
- cc. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi, dan usul penghapusan barang milik negara Sekretariat Direktorat Jenderal;
- dd. Melakukan urusan pengaturan penggunaan peralatan kantor, kendaraan dinas, dan gedung kantor serta sarana dan prasarana lainnya di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal;
- ee. Melakukan urusan penerimaan tamu dan rapat dinas serta usul peserta upacara Sekretariat Direktorat Jenderal;
- ff. Melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal;

- gg. Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal;
- hh. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Sekretariat Direktorat Jenderal; dan
- ii. Melakukan penyusunan laporan Subbagian dan konsep laporan Sekretariat Direktorat Jenderal.

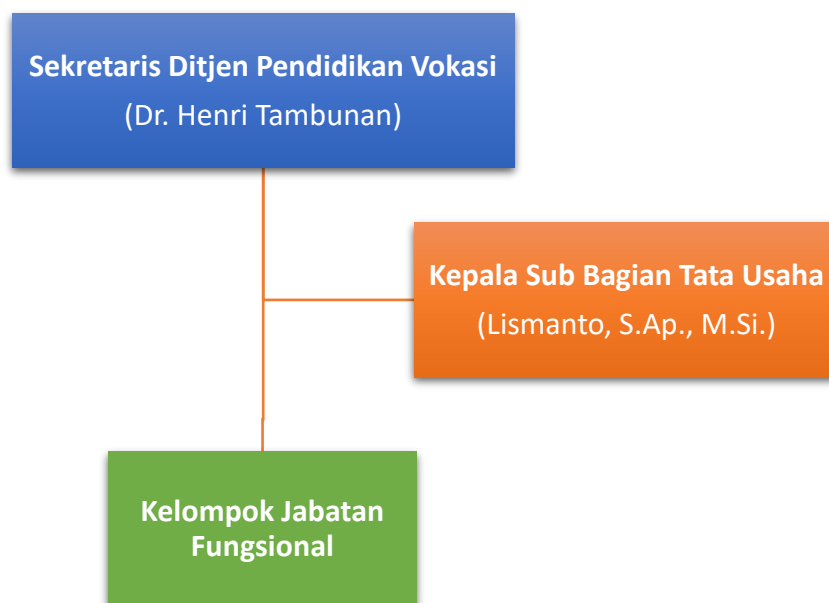
## 2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi, Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam 4 Bidang, yaitu: Bidang Data, Program, dan Pelaporan; Bidang Keuangan dan Barang Milik Negara; Bidang Hukum dan Tatalaksana; serta Bidang Pelayanan Umum dan Kerja Sama.

Masing-masing Bidang dikoordinatori oleh satu orang Pejabat Fungsional yang dibantu oleh satu orang subkoordinator pada setiap sub bidang.

Selengkapnya, struktur organisasi di lingkungan Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi tersaji dalam gambar berikut ini.



Gambar 5  
Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi



#### D. Isu-Isu Strategis

Setditjen Pendidikan Vokasi memiliki tugas dan fungsi yang sangat strategis yaitu melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta berkordinasi dengan satuan kerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Setditjen Pendidikan Vokasi tentunya memiliki isu strategis dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun isu strategis yang dihadapi adalah:

##### 1. Rata-rata predikat SAKIP

Berdasarkan Permendikbud Nomor 9 Tahun 2016, predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan penilaian fakta objektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Dengan pemberian predikat SAKIP, diharapkan mendorong instansi pemerintah untuk konsisten meningkatkan akuntabilitas dalam rangka pencapaian kinerja organisasinya. Predikat SAKIP unit kerja eselon II akan diberikan oleh Biro Perencanaan yang kemudian disampaikan kepada Unit kerja eselon II dan UPT tersebut dengan tembusan pimpinan unit kerja eselon I. Selanjutnya, Menteri dapat memberikan penghargaan kepada unit kerja dalam rangka meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja Kementerian.

##### 2. Predikat ZI-WBK/WBBM

Sesuai dengan Permen-PAN dan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). WBK adalah sebuah status yang dikenakan kepada suatu satuan kerja yang memenuhi kriteria dari Kemen-PAN dan RB. Untuk memperoleh predikat WBK maka satker harus melakukan upaya-upaya pembangunan yang sistematis, dievaluasi oleh Itjen, diajukan kepada KemenPAN-RB untuk dievaluasi ulang, dan menerima piagam WBK bila nilai targetnya terpenuhi.

##### 3. Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L

Anggaran berbasis kinerja sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memberikan suatu sistem penganggaran yang mampu menstimulasi manajemen birokrasi agar mengacu pada prinsip efektifitas, efisiensi alokasi anggaran sektor publik, terjalannya keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan, dan melakukan penghematan keuangan negara tanpa melalaikan prinsip-prinsip profesionalitas. Anggaran berbasis kinerja



senantiasa berhubungan dengan penyusunan rencana kinerja dan rencana anggaran.

Terkait dengan isu strategis di atas, maka Setditjen Pendidikan Vokasi melakukan berbagai program dan kegiatan untuk menjawab isu strategis tersebut. Tentunya satuan kerja yang berada di bawah koordinasi Setditjen Pendidikan Vokasi juga dilibatkan dalam memberikan masukan serta melakukan pemecahan masalah. Dengan pelibatan satker serta pemecahan masalah yang komprehensif, diharapkan dapat mencapai target kinerja tahun 2020 sesuai dengan yang telah diperjanjikan.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### **Visi dan Misi Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 2020-2024**

Untuk menyusun kerangka kerja yang sesuai dengan harapan dengan terbentuknya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan berdasarkan Permendikbud Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud, maka Visi dan Misi Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi mendukung Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sesuai yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020 – 2024 sebagai berikut:

#### **Visi**

Sebagai kementerian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan, Kemendikbud dalam menentukan visi kementerian berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045. Adapun Visi Kemendikbud 2020-2024 adalah:

***“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”***

Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan



pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden tersebut.

### **Misi**

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

### **Tujuan**

Perumusan tujuan Kemendikbud ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Kemendikbud menetapkan lima tujuan sebagaimana dapat dilihat di Tabel berikut.

*Tabel 2. Tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020-2024*

<b>No.</b>	<b>Tujuan</b>
1.	Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
2.	Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik
3.	Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter
4.	Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan
5.	Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel



Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah sasaran strategis (SS) yang akan dicapai pada tahun 2024.

1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan pertama** — Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif adalah meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.
2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan kedua** — Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.
4. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan ketiga** — Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter adalah menguatnya karakter peserta didik.
5. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan keempat** — Peningkatan peran budaya, bahasa, dan sastra dalam kehidupan berbangsa, adalah Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.
6. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan kelima** — Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Kelima sasaran strategis dan kaitannya dengan tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan terangkum dalam Tabel 3 berikut.

*Tabel 3. Sasaran Strategis Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020-2024*

No.	Sasaran Strategis	Tujuan terkait
1.	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	1
2.	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang	2
3.	Menguatnya karakter peserta didik	3
4.	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan	4
5.	Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	5





Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui perjanjian kinerja tahun 2020 dengan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi yang menetapkan satu sasaran kegiatan dengan 3 indikator kinerja beserta target kinerja dan target anggaran yang harus dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2020.

*Tabel 4. Ringkasan Perjanjian Kinerja Setditjen Pendidikan Vokasi*

### TARGET KINERJA

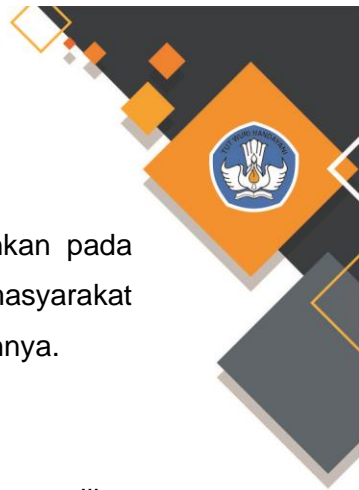
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1	Meningkatnya tata kelola satuan	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	BB
2	kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan	Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	Satker	9,00
3	Vokasi	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Nilai	93,00

### KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	152.382.911.000
<b>Total</b>			152.382.911.000

Dalam rangka merealisasikan Target Kinerja dari Sasaran Kegiatan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja, perealisasiannya didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi. Kegiatan tersebut didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja layanan, yaitu (1) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, (2) Layanan Sarana dan Prasarana Internal, dan (3) Layanan Perkantoran.

Indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan, dicapai melalui kegiatan layanan yang berkaitan dengan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi. Alokasi anggaran yang digunakan untuk kegiatan layanan tersebut terbagi atas anggaran yang digunakan untuk merealisasikan target kinerja dan



anggaran belanja rutin. Kegiatan layanan yang dilakukan tetap menekankan pada kualitas pelayanan program dengan orientasi peningkatan kemampuan masyarakat yang berfokus pada dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

### **1. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB**

Adapun kinerja yang ditargetkan terhadap Satker adalah rata-rata berpredikat minimal BB dengan anggaran sebesar Rp 29.943.044.000,00. Dari pagu anggaran tersebut tidak ada anggaran yang diblokir.

Perealisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I yang merupakan kegiatan yang hanya dimiliki oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi kesekretariatan yang bersifat permanen, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program Anggaran dan Kegiatan
- b. Pengelolaan Data dan Informasi
- c. Pelayanan Pengelolaan BMN Ditjen Pendidikan Vokasi
- d. Fasilitasi Pelaksanaan Program Pendidikan Vokasi di Tingkat Provinsi

### **2. Jumlah Satker yang dibina menuju WBK**

Kinerja yang ditargetkan adalah sebanyak 9 Satker yang dibina menuju WBK dengan anggaran sebesar Rp 48.207.768.000,00. Dari pagu anggaran tersebut tidak ada anggaran yang diblokir.

Perealisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I yang merupakan kegiatan yang hanya dimiliki oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi kesekretariatan yang bersifat permanen, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal
- 2) Organisasi dan Tata Laksana
- 3) Pengadaan penataan dan peningkatan kompetensi pegawai
- 4) Pelayanan Umum Ditjen Pendidikan Vokasi
- 5) Penyelenggaraan kerjasama antar instansi/Lembaga
- 6) Pelayanan Humas dan Protokoler.

### **3. Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93**

Kinerja yang ditargetkan adalah rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker sebesar 93, dengan anggaran sebesar Rp



15.469.319.000,00. Dari pagu anggaran tersebut tidak ada anggaran yang diblokir.

Perealisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I. Kegiatan tersebut hanya dimiliki oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi kesekretariatan. Fungsi kesekretariatannya yang dimaksud bersifat permanen, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Penelaahan dan Revisi Program dan Anggaran
- 2) Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan.

#### **4. Anggaran Belanja Rutin**

Anggaran Belanja Rutin terdiri atas Layanan Sarana dan Prasarana Internal dan Layanan Perkantoran. Kinerja yang ditargetkan untuk Layanan Sarana dan Prasarana Internal adalah 1 Layanan dengan anggaran sebesar Rp 21.076.638.000,00. Dari pagu anggaran tersebut tidak ada anggaran yang diblokir. Perealisasiannya didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengadaan kendaraan bermotor
- b. Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi
- c. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran  
Rehab/renovasi gedung dan bangunan

Kinerja yang ditargetkan pada Layanan Perkantoran adalah 1 Layanan dengan anggaran sebesar Rp 58.762.780.000,00. Dari pagu anggaran tersebut tidak ada anggaran yang diblokir. Perealisasiannya didukung oleh kegiatan sebagai berikut:

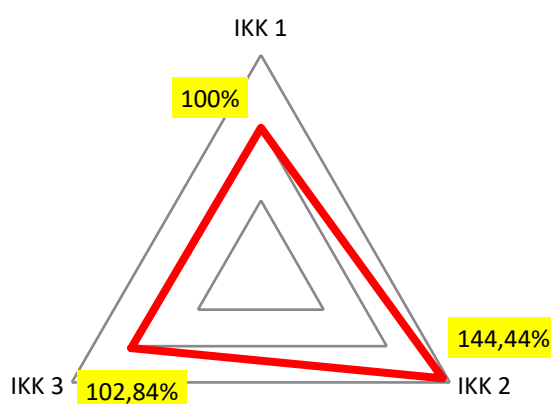
1. Gaji dan Tunjangan
2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2020, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menetapkan satu sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja beserta target kinerja dan target anggaran yang harus dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran yang dalam perealisasiannya didukung oleh kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi. Berikut tingkat ketercapaiannya selama tahun 2020.



Gambar 6 Persentase Capaian Indikator Kinerja Setditjen Pendidikan Vokasi

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Setditjen Pendidikan Vokasi

Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi		Target	Realisasi	%
<b>IKK 1</b>	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB	BB	100%
<b>IKK 2</b>	Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	9	13	144,44%
<b>IKK 3</b>	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	93	95,64	102,84%

##### 1. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB

Kinerja Satker yang ditargetkan Setditjen Pendidikan Vokasi adalah rata-rata berpredikat minimal BB. Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi merupakan satker baru pada tahun 2020, maka SAKIP untuk Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi belum dapat dinilai. Karena baru dapat dilakukan penilaian untuk SAKIP



tahun 2021, oleh karenanya tetap mendapatkan nilai SAKIP BB. Sehingga pencapaian target kinerjanya telah terealisasi dengan persentase capaian 100%.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimaksudkan sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menerapkan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.

Dalam rangka pencapaian predikat nilai SAKIP Satker minimal BB, Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi menggunakan Renstra Eselon I, Menyusun Rencana Kinerja Tahunan, Menyusun Perjanjian Kinerja sampai dengan level staf, dan Menyusun Rencana Aksi.

Pengukuran Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi didukung oleh aplikasi e-Kinerja, Simproka, dan MoLK dalam menetapkan indikator kinerja, capaian kinerja dan pengelolaan data kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2020 dilakukan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas kinerja Satker. Berikut kegiatan yang mendukung perealisasi indikator kinerja tersebut:

#### **1.1 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program Anggaran dan Kegiatan**

Pada kegiatan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program anggaran dan kegiatan sudah terealisasi sebesar 88,85% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.

#### **1.2 Pengelolaan Data dan Informasi**

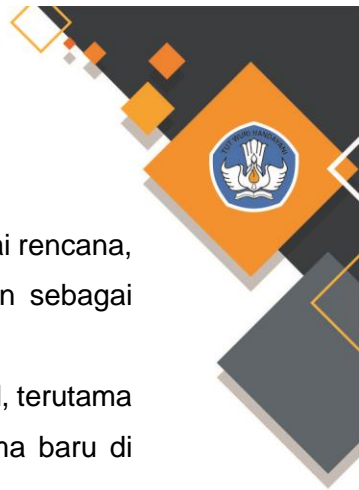
Pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sudah terealisasi sebesar 85,22% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.

#### **1.3 Pelayanan Pengelolaan BMN Ditjen Pendidikan Vokasi**

Pada kegiatan pelaksanaan pelayanan pengelolaan BMN Ditjen Pendidikan Vokasi sudah terealisasi sebesar 99,93% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.

#### **1.4 Fasilitas Pelaksanaan Program Pendidikan Vokasi di Tingkat Provinsi**

Pada kegiatan pelaksanaan fasilitas pelaksanaan program pendidikan vokasi di tingkat provinsi sudah terealisasi sebesar 96,49% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.



Sekalipun target indikator kinerja tersebut telah terealisasi sesuai rencana, di dalam pelaksanaannya ditemukan hambatan dan permasalahan sebagai berikut:

1. Perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kemendikbud, terutama pada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sebagai unit utama baru di Kemendikbud;
2. DIPA Setditjen Pendidikan Vokasi terbit pada pertengahan bulan Mei 2020;
3. Masih ada blokir anggaran yang jumlahnya cukup besar.
4. Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga terjadi kekurangan SDM pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara paralel/ bersamaan.

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Terus berkoordinasi antar Satuan Kerja yang berkaitan dengan perubahan tata kerja/prosedur kerja dan pemanfaatan SDM
2. Memaksimalkan SDM yang ada, berkoordinasi dan berkolaborasi antar bidang dalam pelaksanaan program;
3. Mengumpulkan data dukung untuk mempercepat proses buka blokir;
4. Mengkoordinasikan kembali jadwal pelaksanaan kegiatan termasuk dalam hal manajemen pembagian SDM sesuai dengan kebutuhan masing-masing kegiatan.

Sebagai unit utama baru, capaian kinerja Setditjen Pendidikan Vokasi nya tidak bisa dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Tahun 2020 ini juga merupakan tahun pertama Renstra sehingga tidak bisa dibandingkan dengan target Renstra sebelumnya.

Namun jika merujuk pada target akhir Renstra di tahun 2024 mendatang yaitu memperoleh predikat nilai A atas SAKIP, maka capaian kinerja tahun 2020 dengan predikat nilai BB dengan persentase capaian 100% ini maka optimis dalam 4 tahun mendatang target tersebut dapat direalisasikan. Berikut kategori penilaian hasil evaluasi pada SAKIP. Berikut kategori penilaian hasil evaluasi yang dimaksud.

Kategori Penilaian Hasil Evaluasi ( <i>Scoring</i> )		
Kategori	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
B	>60-70	<b>Baik</b> akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
CC	>50-60	<b>Cukup (Memadai)</b> , akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki system yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar.
C	>30-50	<b>Kurang baik</b> , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja, tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
D	0-30	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk menerapkan manajemen kinerja perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar.

Gambar 7  
Kategori Penilaian Hasil Evaluasi (*Scoring*) SAKIP

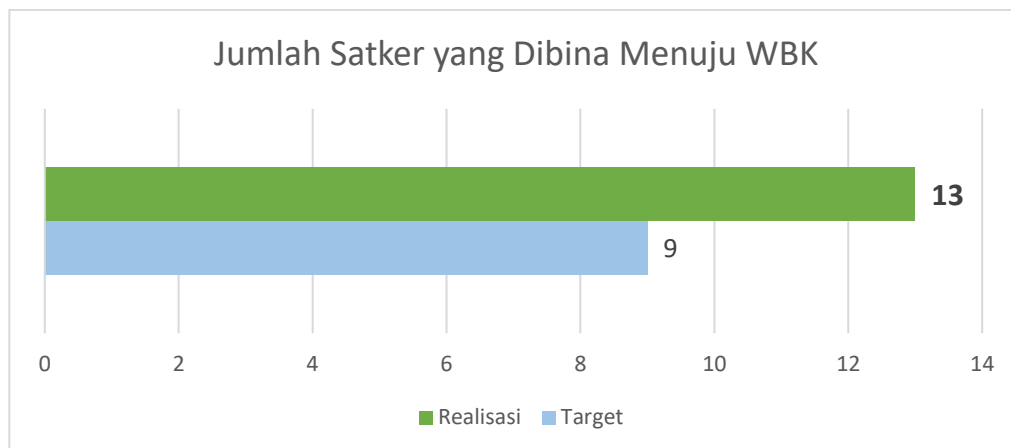


Gambar 8  
Target IKK 1 Renstra Setditjen Pendidikan Vokasi

Meskipun telah mencapai target, namun capaian Rata-rata Predikat SAKIP Satker bukan merupakan target kumulatif sehingga diperlukan konsistensi untuk meningkatkan pencapaian hasil yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya.

## 2. Jumlah Satker yang dibina menuju WBK

Kinerja berikutnya yang ditargetkan adalah sebanyak sembilan Satker yang dibina menuju WBK. Pada realisasinya, di tahun 2020 ini jumlah Satker yang memperoleh predikat WBK adalah sebanyak 13. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pencapaian target kinerja melebihi target awal dengan persentase capaian sebesar 144,44%.



*Gambar 9*  
*Jumlah Satker di Lingkungan Ditjen Diksi yang dibina menuju WBK*

Kemudian dari tujuh Satker binaan yang diajukan untuk mendapatkan predikat ZI-WBK, lima Satker berhasil meraih predikat ZI-WBK. Sedangkan dari dua Satker binaan yang diajukan untuk mendapatkan predikat WBBM, satu diantaranya berhasil meraih predikat WBBM.

Predikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Pemberian predikat WBK dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Penilai Nasional yang terdiri dari unsur KemenPAN-RB, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia.

Bagi satker yang belum memenuhi nilai minimal menuju WBK akan diberikan rekomendasi untuk memperoleh pembinaan dari sekretariat unit utama.

Berikut program/kegiatan yang mendukung perealisasi indikator kinerja tersebut:

### **2.1. Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal**

Pada program/kegiatan pelaksanaan pelayanan hukum dan kepatuhan internal sudah terealisasi sebesar 99,91% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.





## **2.2. Organisasi dan Tata Laksana**

Pada program/kegiatan pelaksanaan organisasi dan tata laksana sudah terealisasi sebesar 99,77% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.

## **2.3. Pengadaan Penataan dan Peningkatan Kompetensi Pegawai**

Pada program/kegiatan pelaksanaan Pengadaan penataan dan peningkatan kompetensi pegawai sudah terealisasi sebesar 96,76% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.

## **2.4. Pelayanan Umum Ditjen Pendidikan Vokasi**

Pada program/kegiatan pelaksanaan pelayanan umum Ditjen Pendidikan Vokasi sudah terealisasi sebesar 99,49% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.

## **2.5. Penyelenggaraan kerjasama antar instansi/lembaga**

Pada program/kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama antar instansi/lembaga sudah terealisasi sebesar 99,85% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.

## **2.6. Pelayanan Humas dan Protokoler**

Pada program/kegiatan pelaksanaan pelayanan humas dan protokoler sudah terealisasi sebesar 99,31% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.

Target indikator kinerja tersebut di atas telah terealisasi bahkan sudah melebihi target yang ditetapkan namun dalam pelaksanaannya ditemukan hambatan dan permasalahan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kemendikbud, terutama di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sebagai unit utama baru di Kemendikbud;
2. DIPA Setditjen Pendidikan Vokasi yang baru terbit pada pertengahan bulan Mei 2020;
3. Perlunya mempertahankan wilayah bebas dari korupsi bagi satuan kerja yang telah memperoleh sertifikat WBK dan terus memperjuangkan satuan kerja yang belum mendapatkan sertifikat WBK guna meningkatkan tata kelola yang akuntabel dan transparan dalam rangka mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang.



4. Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga terjadi kekurangan SDM pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan bersamaan.

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi seperti di atas telah dilakukan Langkah-langkah antisipasi sebagai berikut:

1. Terus berkoordinasi antar Satuan Kerja yang berkaitan dengan perubahan tata kerja/prosedur kerja dan pemanfaatan SDM
2. Memaksimalkan SDM yang ada dan berkoordinasi serta berkolaborasi antar Bidang dalam pelaksanaan program;
3. Dalam mempertahankan wilayah bebas dari korupsi, Setditjen Pendidikan Vokasi melakukan berbagai antisipasi dan pemecahan masalah dengan melakukan koordinasi dan pendampingan dalam mempertahankan dan memperjuangkan sertifikat WBK dengan melibatkan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Memperbaiki kembali proses peta bisnis dan melakukan sinkronisasi antara satu kegiatan dengan ketersediaan kesiapan dan ketersediaan dana agar tidak terlalu lama mengendap.
5. Menentukan besaran peta proses bisnis pada tiap sub layanan berdasarkan besaran anggaran.
6. Merencanakan Prosedur Operasional Standar (POS) mengenai perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan.
7. Kembali melihat jadwal pelaksanaan kegiatan agar SDM yang dibutuhkan tercukupi dan sesuai dengan kriteria kegiatan yang dilaksanakan.

Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena statusnya sebagai unit utama baru. Begitu pula halnya dengan target Renstra.

Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2020 dengan target akhir Renstra tahun 2024 maka tidak bisa dibandingkan, karena pada Renstra Kemendikbud sesuai dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020, Target Capaian Kinerja untuk tahun 2021-2024 bukan lagi jumlah Satker yang dibina menuju WBK, melainkan Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM.

Pada tahun 2020 sebanyak enam Satker sudah menuju WBK dengan rincian lima Satker mendapatkan predikat ZI-WBK dan satu Satker

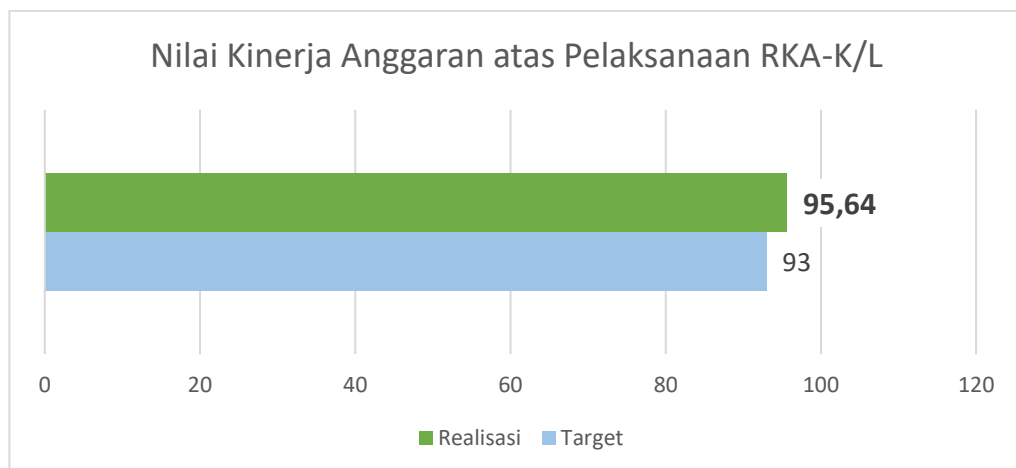
mendapatkan predikat WBBM. Dengan kata lain sudah tercapai sebesar 20% dari target akhir Renstra yaitu sebanyak 30 Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM. Dengan demikian masih ada sisa target sebanyak 24 Satker mendapat predikat ZI-WBK/WBBM yang harus sudah dicapai pada tahun 2024.



*Gambar 10*

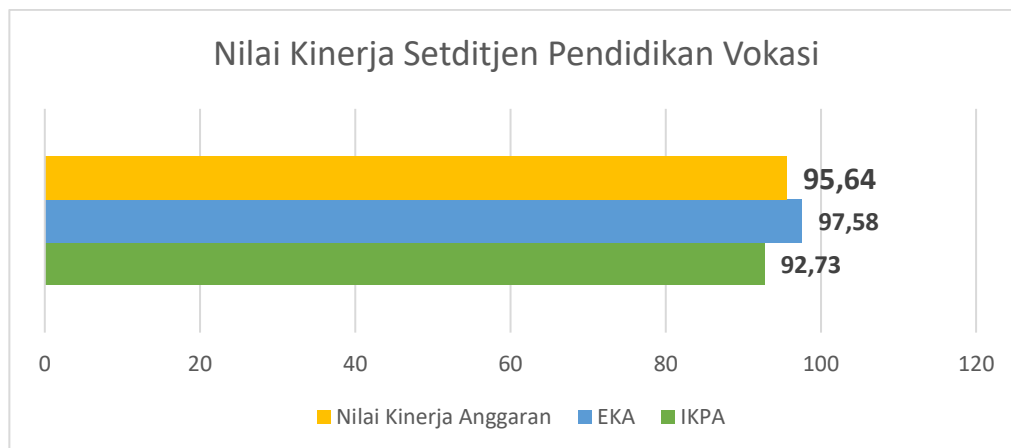
*Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM*

### 3. Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93

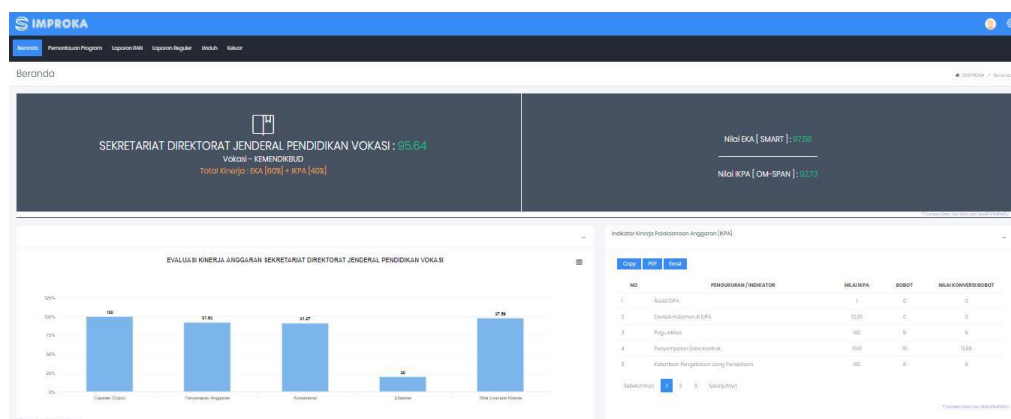


*Gambar 11*

*Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Setditjen Diksi*



Gambar 12  
Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Setditjen Diksi



Gambar 13  
Tangkapan layar laman Simproka Setditjen Diksi

Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker ditargetkan sebesar 93. Setelah diukur, berdasarkan data yang diambil dari aplikasi Simproka Kemendikbud, pencapaian target kinerja yang terealisasi adalah sebesar 95,64. Nilai tersebut berasal dari penggabungan nilai IKPA (40%) dan nilai EKA (60%). Program/ kegiatan yang mendukung terealisasinya indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

### 3.1 Penyusunan Penelaahan dan Revisi Program dan Anggaran

Program/ kegiatan Pelaksanaan penyusunan penelaahan dan revisi program dan anggaran sudah terealisasi sebesar 91,68% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.



### 3.2 Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan

Program/ kegiatan pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan keuangan sudah terealisasi sebesar 82,23% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.

Sekalipun target indikator kinerja tersebut telah terealisasi bahkan sudah melebihi target namun dalam pelaksanaannya ditemukan hambatan dan permasalahan, sebagai berikut:

1. Perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kemendikbud, terutama di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sebagai unit utama baru di Kemendikbud;
2. DIPA Setditjen Pendidikan Vokasi yang baru terbit pada pertengahan bulan Mei 2020;
3. Kondisi Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia yang berimbas pada pelaksanaan kegiatan;
4. Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga terjadi kekurangan SDM pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan bersamaan.

Berikut adalah Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut:

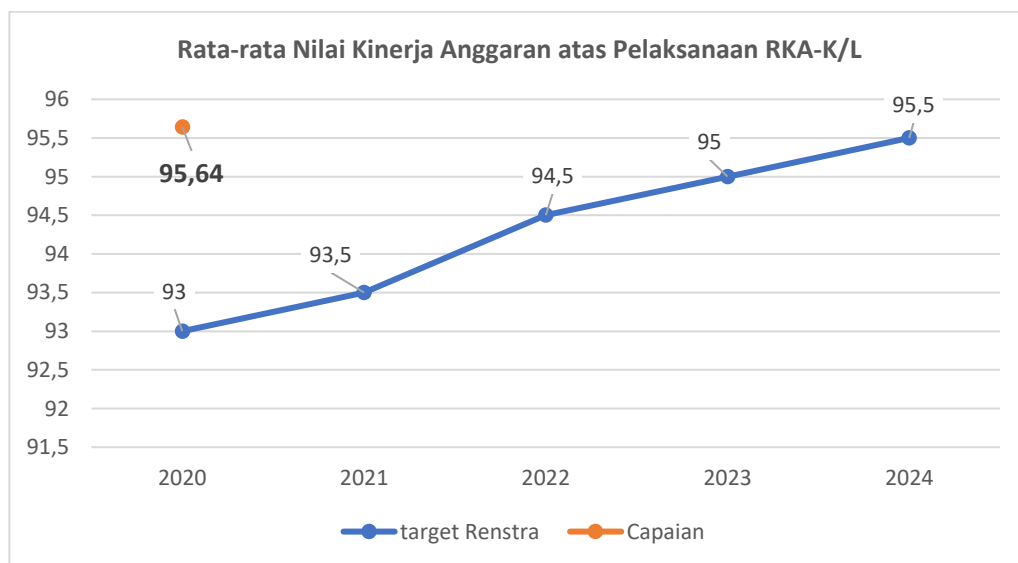
1. Terus berkoordinasi antar Satuan Kerja yang berkaitan dengan perubahan tata kerja/prosedur kerja dan pemanfaatan SDM;
2. Memaksimalkan SDM yang ada dan berkoordinasi serta berkolaborasi antar Bidang dalam pelaksanaan program;
3. Mendorong realisasi pengadaan belanja modal untuk mendorong daya serap
4. Memperbaiki kembali proses peta bisnis dan melakukan sinkronisasi antara satu kegiatan dengan ketersediaan dana agar tidak terlalu lama mengendap.
5. Menentukan besaran peta proses bisnis pada tiap sub layanan berdasarkan besarnya anggaran.
6. Kembali melihat jadwal pelaksanaan kegiatan agar SDM yang dibutuhkan tercukupi dan sesuai dengan kriteria kegiatan yang dilaksanakan.

Capaian kinerja tahun 2020 tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi merupakan Satker yang baru terbentuk di tahun yang sama begitu pula dengan Renstra, tahun 2020 ini merupakan tahun pertama Renstra sehingga tidak bisa dibandingkan dengan target Renstra sebelumnya.

Apabila capaian kinerja tahun 2020 dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2024 maka Nilai Kinerja Anggaran sebesar 95,64 dengan persentase capaian 102,56% sudah melebihi target akhir Renstra, sebesar 95,50.

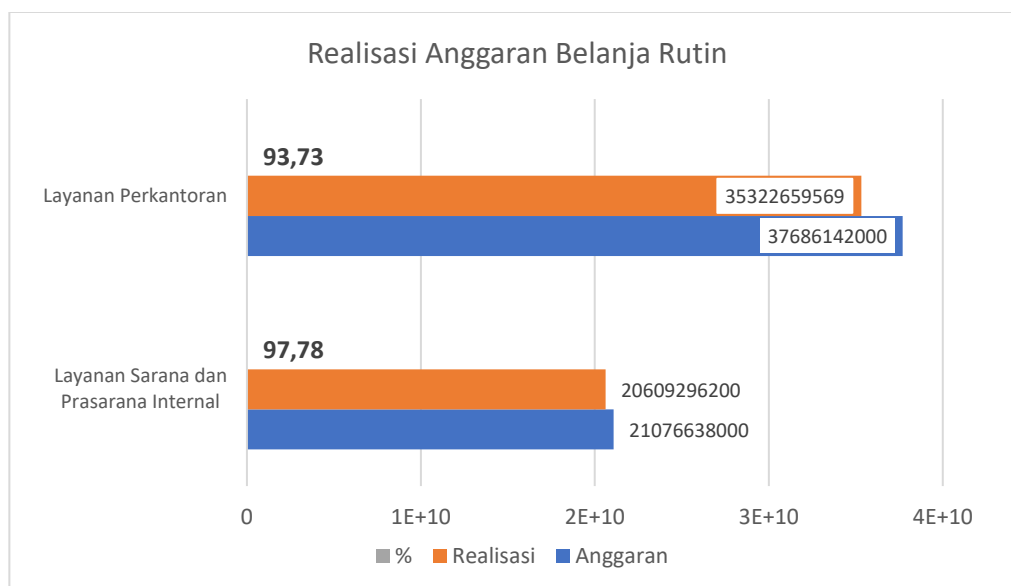
Namun, meskipun capaian Nilai Kinerja Anggaran telah melebihi target akhir Renstra tahun 2024, capaian tersebut bukan merupakan target kumulatif sehingga diperlukan konsistensi untuk peningkatan pencapaian hasil yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya.

Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-KL tersebut tergambar pada diagram berikut.



**Gambar 14**  
*Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L*

#### 4. Anggaran Belanja Rutin



Gambar 15  
Realisasi Anggaran Belanja Rutin Setditjen Diksi

Anggaran Belanja Rutin terdiri atas Layanan Sarana dan Prasarana Internal dan Layanan Perkantoran. Layanan Sarana dan Prasarana Internal kinerjanya ditargetkan sebanyak 1 Layanan. Setelah diukur pencapaian target kinerjanya pada akhir tahun 2020, telah terealisasi dengan persentase capaian kinerja 100%. Untuk perealisasi indikator kinerja tersebut, didukung program/kegiatan berikut:

##### 4.1 Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Pada tahun 2020 ini pelaksanaan layanan sarana dan prasarana internal sudah terealisasi sebesar 97,78%. Capaian kinerjanya tercapai 1 Layanan dengan persentase capaian 100%. Berikut capaian perealisasi indikator kinerja tersebut:

- Dilaksanakan Penggantian Chiller AC untuk AC Central di lantai 20 untuk memperkuat layanan pendingin ruangan khususnya lantai bagian atas Gedung E kompleks Perkantoran Kemdikbud.
- Pengadaan 6 unit kendaraan pimpinan, kendaraan Operasional, dan mobil angkut barang.
- Penataan ruang kerja dalam rangka penyesuaian dengan struktur organisasi di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.



- d. Penggantian pompa Instalasi Pemadam Kebakaran.
- e. Penggantian AHU untuk lantai 12 Gedung E Komplek Perkantoran Kemendikbud.
- f. Pengadaan data *storage* untuk memperkuat penggunaan aplikasi Dapodik dan pengadaan server untuk menunjang pengelolaan keuangan dan kepegawaian.
- g. Rehab rumah dinas Gandaria.
- h. Penggantian dan pengadaan peralatan pendukung kerja lainnya.

## 4.2 Layanan Perkantoran

Sampai akhir tahun 2020 pelaksanaan layanan perkantoran telah terealisasi sebesar 93,73%. Capaian kinerjanya tercapai 1 Layanan dengan persentase capaian 100%. Berikut capaian perealisasi indikator kinerja tersebut:

### 4.2.1 Gaji dan Tunjangan

### 4.2.2 Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Sekalipun target indikator kinerja pada Anggaran Belanja Rutin tersebut telah terealisasi sesuai rencana namun dalam pelaksanaannya ditemukan hambatan dan permasalahan yaitu:

1. Terdapatnya berbagai masalah mekanikal dan elektrikal Gedung E Kemendikbud yang tidak sesuai rencana, seperti rusaknya Filter AHU, AC Split, CCTV, dan Pipa Air Bersih.
2. Perjalanan dinas pimpinan yang sudah dianggarkan, tidak jadi dilaksanakan karena tidak mendapat persetujuan oleh Menteri dengan alasan pandemi Covid-19.
3. Pandemi covid-19 mengharuskan pegawai untuk bekerja dari rumah dan bergantian untuk bekerja di kantor.

Langkah-langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut adalah:

1. Melakukan audit terhadap Gedung E di Komplek Perkantoran Kemendikbud untuk mengetahui berbagai kerusakan mekanikal dan elektrikal, supaya dapat dianggarkan dengan baik.





2. Melakukan realokasi anggaran perjalanan dinas pimpinan yang tidak jadi dipakai, sehingga tetap dapat dialih gunakan dalam rangka menunjang pelaksanaan program, kegiatan, serta kebijakan Ditjen Pendidikan Vokasi dalam masa pandemi Covid-19.
3. Melakukan penghapusan dan lelang barang-barang yang sudah tidak terpakai, sehingga gudang yang semula dipakai oleh barang-barang tersebut dapat menampung arsip dan barang milik negara lainnya.

Capaian kerjanya tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi merupakan Satker yang baru dibentuk pada tahun 2020. Pada tahun 2020 ini merupakan tahun pertama Renstra sehingga tidak bisa dibandingkan dengan target Renstra sebelumnya.

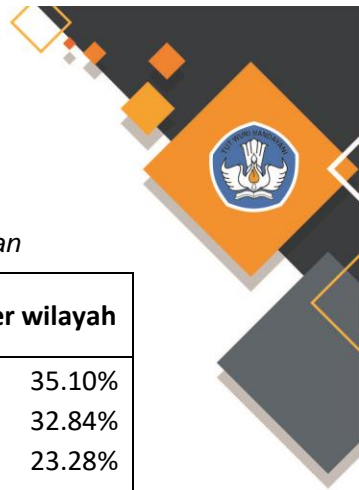
Selain itu, capaian kerjanya juga tidak dapat dibandingkan dengan target akhir Renstra, karena targetnya setiap tahun sama, sebanyak 1 (satu) Layanan dan bukan merupakan target kumulatif.

## **Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2020**

### **1. *Tracer Study***

Pada tahun 2020 telah dilakukan penelusuran lulusan Perguruan Tinggi Vokasi, SMK, dan Lembaga Kursus dan Pelatihan. Mengingat keterbatasan waktu serta dalam masa pandemi Covid-19, telah diambil sampel dari PTV/SMK/LKP di 23 Provinsi menggunakan media daring dengan komposisi sebagai berikut:

Total target responden terpilih yang sesuai dengan data dari Dapodik berjumlah 399.501 responden sebagai target survey. Hasil perhitungan dan analisis menunjukkan bahwa jumlah kuisisioner yang sukses terkirim melalui sistem aplikasi yaitu 247.649 kuisisioner dan telah selesai diisi oleh 100.491 responden, sehingga capaian keterisian kuisisioner yaitu 40.58%.



Tabel 6. Jumlah Target Responden dan Capaian Selesai Pengisian

No	Provinsi	Target	Selesai	Persentase per wilayah
1	Aceh	5,009	1,758	35.10%
2	Bali	9,352	3,071	32.84%
3	Bangka Belitung	3,11	724	23.28%
4	Banten	11,088	5,4	48.70%
5	Bengkulu	1,615	1,273	78.82%
6	D.I.Yogyakarta	6,059	2,653	43.79%
7	D.K.I.Jakarta	13,403	8,065	60.17%
8	Gorontalo	1,198	836	69.78%
9	Jambi	3,297	962	29.18%
10	Jawa Barat	41,313	19,277	46.66%
11	Jawa Tengah	37,477	14,297	38.15%
12	Jawa Timur	47,131	14,897	31.61%
13	Kepulauan Riau	5,624	3,278	58.29%
14	Lampung	6,835	2,236	32.71%
15	Riau	8,288	3,092	37.31%
16	Sulawesi Barat	1,096	155	14.14%
17	Sulawesi Selatan	6,612	4,558	68.94%
18	Sulawesi Tengah	2,142	1,101	51.40%
19	Sulawesi Tenggara	1,743	827	47.45%
20	Sulawesi Utara	2,7	760	28.15%
21	Sumatera Barat	8,312	3,042	36.60%
22	Sumatera Selatan	10,001	3,628	36.28%
23	Sumatera Utara	14,244	4,601	32.30%
<b>Jumlah</b>		<b>247,649</b>	<b>100,491</b>	<b>40.58%</b>

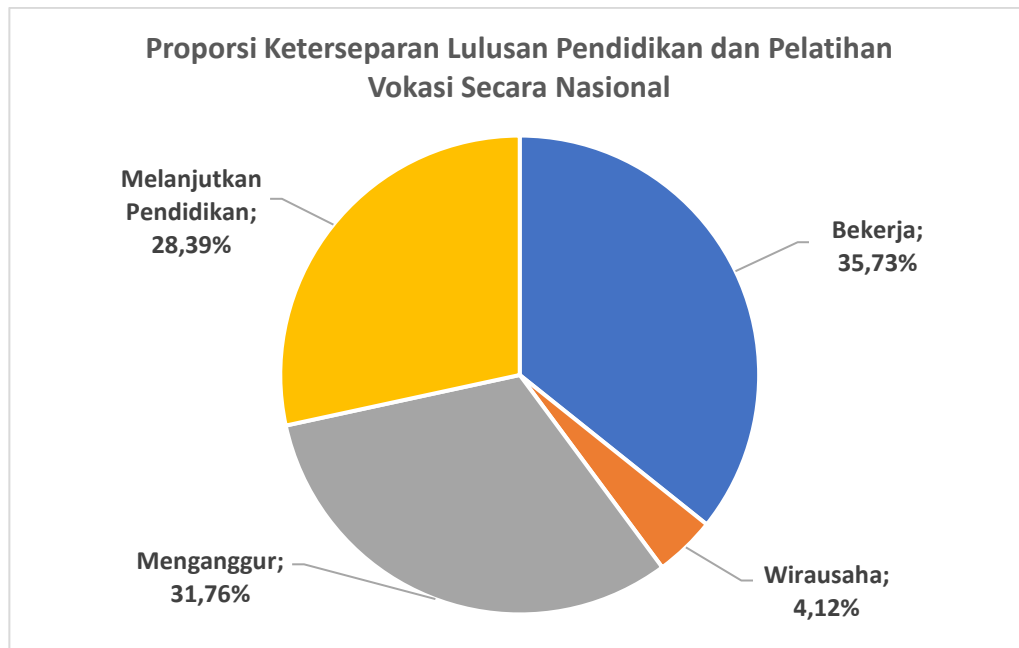
Dari hasil pelaksanaan *tracer study* diperoleh jumlah lulusan yang bekerja sebanyak 40.040 orang dari 100.491 orang sampel yang ditelusuri, yaitu 35.904 orang responden bekerja dan 4.136 orang reponden berwirausaha. Komposisi hasil penelusuran lulusan sebagai berikut:



Tabel 7. Keterserapan lulusan pendidikan vokasional di dunia kerja

Provinsi	Bekerja			Melanjutkan Pendidikan			Manganggur			Wirausaha			Grand Total
	Jumlah	% Provinsi	% Nasional	Jumlah	% Provinsi	% Nasional	Jumlah	% Provinsi	% Nasional	Jumlah	% Provinsi	% Nasional	
Aceh	328	18,66%	0,91%	493	28,04%	1,73%	860	48,92%	2,69%	77	4,38%	1,86%	1.758
Bangka Belitung	299	41,30%	0,83%	210	29,01%	0,74%	161	22,24%	0,50%	54	7,46%	1,31%	724
Banten	1.583	29,31%	4,41%	1.728	32,00%	6,06%	1.952	36,15%	6,12%	137	2,54%	3,31%	5.400
Bengkulu	207	16,26%	0,58%	411	32,29%	1,44%	585	45,95%	1,83%	70	5,50%	1,69%	1.273
D.I.Yogyakarta	907	34,19%	2,53%	840	31,66%	2,94%	741	27,93%	2,32%	165	6,22%	3,99%	2.653
D.K.I.Jakarta	2.716	33,68%	7,56%	2.703	33,52%	9,47%	2.425	30,07%	7,60%	221	2,74%	5,34%	8.065
Gorontalo	150	17,94%	0,42%	410	49,04%	1,44%	247	29,55%	0,77%	29	3,47%	0,70%	836
Jambi	160	16,63%	0,45%	464	48,23%	1,63%	300	31,19%	0,94%	38	3,95%	0,92%	962
Bali	955	31,10%	2,66%	994	32,37%	3,48%	1.016	33,08%	3,18%	106	3,45%	2,56%	3.071
Jawa Barat	7.446	38,63%	20,74%	4.257	22,08%	14,92%	6.796	35,25%	21,29%	778	4,04%	18,81%	19.277
Jawa Tengah	6.877	48,10%	19,15%	3.499	24,47%	12,26%	3.383	23,66%	10,60%	538	3,76%	13,01%	14.297
Jawa Timur	6.571	44,11%	18,30%	3.532	23,71%	12,38%	3.984	26,74%	12,48%	810	5,44%	19,58%	14.897
Kepulauan Riau	1.380	42,10%	3,84%	775	23,64%	2,72%	1.021	31,15%	3,20%	102	3,11%	2,47%	3.278
Lampung	967	43,25%	2,69%	280	12,52%	0,98%	826	36,94%	2,59%	163	7,29%	3,94%	2.236
Riau	702	22,70%	1,96%	1.202	38,87%	4,21%	1.071	34,64%	3,36%	117	3,78%	2,83%	3.092
Sulawesi Barat	26	16,77%	0,07%	75	48,39%	0,26%	50	32,26%	0,16%	4	2,58%	0,10%	155
Sulawesi Selatan	695	15,25%	1,94%	2.250	49,36%	7,89%	1.455	31,92%	4,56%	158	3,47%	3,82%	4.558
Sulawesi Tengah	191	17,35%	0,53%	635	57,67%	2,23%	236	21,44%	0,74%	39	3,54%	0,94%	1.101
Sulawesi Tenggara	118	14,27%	0,33%	477	57,68%	1,67%	216	26,12%	0,68%	16	1,93%	0,39%	827
Sulawesi Utara	95	12,50%	0,26%	415	54,61%	1,45%	237	31,18%	0,74%	13	1,71%	0,31%	760
Sumatera Barat	906	29,78%	2,52%	783	25,74%	2,74%	1.218	40,04%	3,82%	135,00%	4,44%	3,26%	3.042
Sumatera Selatan	1.492	41,12%	4,16%	728	20,07%	2,55%	1.237	34,10%	3,88%	171	4,71%	4,13%	3.628
Sumatera Utara	1.133	24,63%	3,16%	1.372	29,82%	4,81%	1.901	41,32%	5,96%	195	4,24%	4,71%	4.601
<b>Grand Total</b>	<b>35.904</b>		<b>100.00%</b>	<b>28.533</b>		<b>100.00%</b>	<b>31.918</b>		<b>100.00%</b>	<b>4.136</b>		<b>100.00%</b>	<b>100.491</b>

Secara total, dari 100.491 responden lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi, berturut turut sejumlah 35.904 responden (35,73%) dan 4.136 responden (4,12%) telah bekerja dan berwirausaha. Sedangkan responden yang menganggur (belum memungkinkan bekerja/wirausaha, dan sedang mencari kerja) dan melanjutkan pendidikan/pelatihan yaitu sejumlah 31.918 responden (31,76%) dan 28.533 responden (28,39%).



Gambar 16

*Proporsi Keterseparan Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi secara Nasional*

## 2. Publikasi

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang merupakan unit utama yang baru dibentuk di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 tentunya perlu memperkenalkan program-programnya kepada masyarakat, khususnya yang bergerak di bidang Pendidikan Vokasi.

Media sosial yang digunakan untuk memperkenalkan program Pendidikan Vokasi dikelola oleh Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi melalui Subkoordinator Bidang Humas dan Publikasi.

Berbagai strategi pengelolaan dilakukan mulai dari membuat editorial plan untuk menata terjaganya konsistensi konten.

 **25.014 Followers**

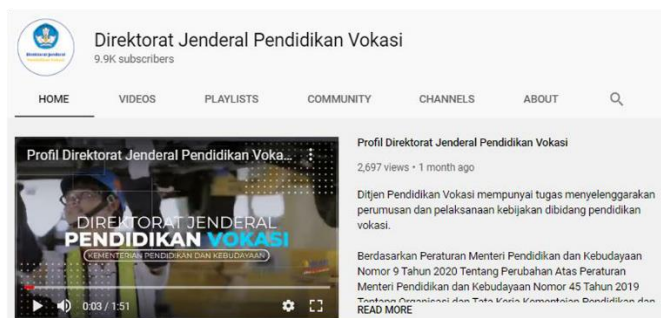
 **1.684 Followers**

 **8.687 Subscribers**

 **979 Followers**

Selain media sosial, kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh Ditjen Pendidikan Vokasi juga ditayangkan melalui kanal YouTube.

## YouTube Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi



**117 Video**  
**8.687 Subscribers**  
**1.049.365 Views**

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperkenalkan Ditjen Pendidikan Vokasi juga dilakukan dengan menerapkan protokol Kesehatan yang ketat karena masih dalam masa pandemi Covid-19, yaitu:

- V-Factor Indonesia;
- Lomba Cover Lagu “Condong Pada Mimpi (Vokasi Berjaya)”;
- Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia; serta
- Launching Program Pendidikan Vokasi sebanyak 12 kali.



*Gambar 17*  
*Kegiatan V-Factor Indonesia 2020*



Gambar 18  
Poster Lomba Cover Lagu “Condong Pada Mimpi (Vokasi Berjaya)”

Media cetak juga menjadi media untuk melakukan publikasi program Ditjen Pendidikan Vokasi yang berupa:

- Profil dan naskah cetak Lainnya
- Majalah Vokasi yang telah terbit sebanyak 9 edisi sepanjang tahun 2020



Gambar 19  
Beberapa cover majalah Vokasi terbitan tahun 2020



### 3. Reformasi Birokrasi dan Regulasi

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi telah berhasil melaksanakan pembinaan kepada 13 Satker dari target yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebanyak 9 Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Setditjen Pendidikan Vokasi juga berhasil mengantarkan 5 Satker mendapatkan predikat ZI-WBK. Kelima Satker tersebut yaitu: Politeknik Negeri Bandung, BBPPMPV Bidang Bangunan dan Listrik, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata, BBPPMPV Bidang Pertanian, dan BBPPMPV Seni dan Budaya. Selain itu ada juga 1 Satker binaan Setditjen Pendidikan Vokasi yang berhasil memperoleh predikat WBBM, yaitu BBPPMPV Bidang Otomotif dan Elektronika Malang.



#### Satker Predikat ZI-WBK

- Politeknik Negeri Bandung
- BBPPMPV Bidang Bangunan dan Listrik
- BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata
- BBPPMPV Bidang Pertanian
- BBPPMPV Seni dan Budaya



#### Satker Predikat WBBM

BBPPMPV Bidang Otomotif dan Elektronika

Selain itu, Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi sebagai koordinator penyusunan bahan peraturan perundang-undangan dan penelaahan dan fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal telah berhasil menetapkan Regulasi Pendidikan Vokasi sebanyak 3 Kepdirjen dan Juknis Bantuan Pemerintah sebanyak 32 Perdirjen.



Regulasi Pendidikan Vokasi

**3 Keputusan Direktur Jenderal**

Juknis Bantuan Pemerintah

**32 Peraturan Direktur Jenderal**



Kegiatan lain yang berhasil dilaksanakan oleh Setditjen Pendidikan Vokasi selaku koordinator pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana dan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yaitu:

- Sosialisasi Penyetaraan Jabatan Struktural menjadi Jabatan Fungsional Tertentu
- Pelatihan penyusunan LHKPN dan LHKASN
- Pelatihan penggunaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN
- Pelatihan Admin Aplikasi Sistem Administrasi Kepegadawaian (SiAP) Ditjen Pendidikan Vokasi

#### **4. Bidang Keuangan dan Barang Milik Negara**

Kinerja Keuangan yang berhasil dilaksanakan Setditjen Pendidikan Vokasi selaku koordinator pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, yaitu:

1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.
2. Rekonsiliasi Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Jenderal Kemendikbud dan BPK RI di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.
3. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dalam menghadapi Langkah langkah Akhir Tahun Anggaran 2020 di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.
4. Pemantauan dan proses migrasi aset tetap yang berasal dari Kemristek – BRIN ke Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbud.
5. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan dengan menggunakan sistem SAI (SAK dan SIMAK BMN).
6. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I, Triwulan III, dan Tahunan Tingkat UAPPA-E1 dan UAPPB-E1 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Pembinaan Satker PNB dan Politeknik BLU

1. Simplifikasi Jenis dan Tarif PNB pada 47 satker Politeknik Negeri/AKN dan 7 satker BB/BP PMPV Dalam Revisi PP Nomor 82 Tahun 2016.





2. Usulan BLU telah melebihi target dari 1 satker menjadi 3 satker untuk diproses menjadi PPK BLU pada Politeknik Negeri Bali, Politeknik Negeri Jakarta dan Politeknik Negeri Semarang.
3. Reviu dan Bimbingan Teknis Dokumen BLU pada Politeknik Negeri Bali, Politeknik Negeri Jakarta dan Politeknik Negeri Semarang Untuk diusulkan menjadi satker PPK BLU.

Setditjen Pendidikan Vokasi juga telah berhasil melaksanakan pembinaan BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, yaitu:

1. Melaksanakan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.
2. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi rencana kebutuhan dan pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.
3. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.
4. Melaksanakan urusan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Direktorat Jenderal.
5. Melaksanakan urusan penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.
6. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

## **5. Bantuan Pemerintah**

Sepanjang tahun 2020 Setditjen Pendidikan Vokasi telah berhasil menyalurkan sejumlah bantuan pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bantuan Pemerintah Tanggap Bencana Covid-19 Tahun 2020 diberikan kepada 80 Satuan Pendidikan @ Rp50.000.000,00.
- b. Bantuan Pemerintah Ekpose Digital Bidang Pendidikan Vokasi Tahun 2020 diberikan kepada 475 Lembaga @ Rp5.000.000,00.

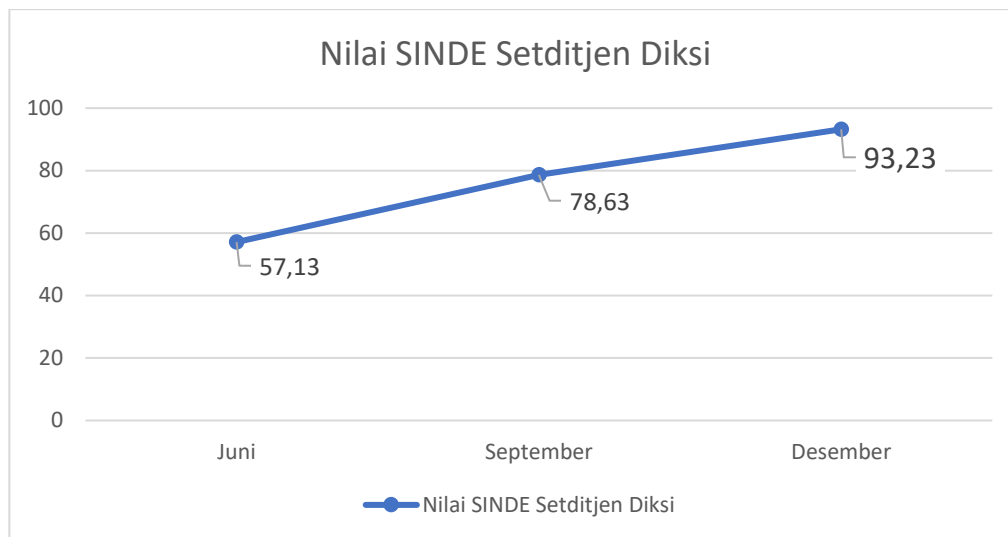
## **6. Ketatausahaan**

### **Persuratan Elektronik (SINDE)**

Sejalan dengan agenda perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi ketatausahaan, Kemendikbud melalui

Sekretariat Jenderal telah mengembangkan Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan adanya SINDE, kegiatan persuratan dapat berjalan optimal tanpa terkendala jarak. Dengan memanfaatkan SINDE, pegawai dapat mengurangi risiko terjadinya kehilangan dokumen, memudahkan pencarian dan pelacakan dokumen sehingga dapat meningkatkan respon terhadap suatu layanan.



*Gambar 20*  
*Nilai SINDE Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi*

### Penataan Arsip

Pada tahun 2020 telah dilakukan penataan arsip ex PAUD Dikmas dengan capaian sebagai berikut:



Jumlah arsip yang didata sebanyak **10,316 dokumen** (1.706 boks dokumen)



Jumlah arsip yang dimusnahkan sebanyak **24.160 dokumen** (Berdasarkan Surat Kepala ANRI Nomor: BKN.00.03/248/2020 tanggal 23 Oktober 2020)



Jumlah arsip yang dipindahkan ke depo Arsip Ciketing sebanyak **1.508 boks dokumen**



## 7. Pengembangan SDM

Pengembangan SDM yang dilakukan oleh Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi sepanjang tahun 2020 ini untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

- a. Internalisasi Program Pendidikan Vokasi
- b. Pelatihan *Public Speaking* bagi Tenaga Pengemudi, Tenaga Keamanan, Pramukantor, Tenaga Kesehatan, dan Teknisi



Gambar 21  
Internalisasi Program Pendidikan Vokasi

## B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dalam DIPA tahun 2020 sebesar Rp 152.382.911.000,00. Dari pagu anggaran tersebut sudah tidak terdapat blokir anggaran. Pagu anggaran tersebut telah berhasil direalisasikan sebesar Rp 144.360.404.029,00 dengan persentase daya serap sebesar 94,74%.

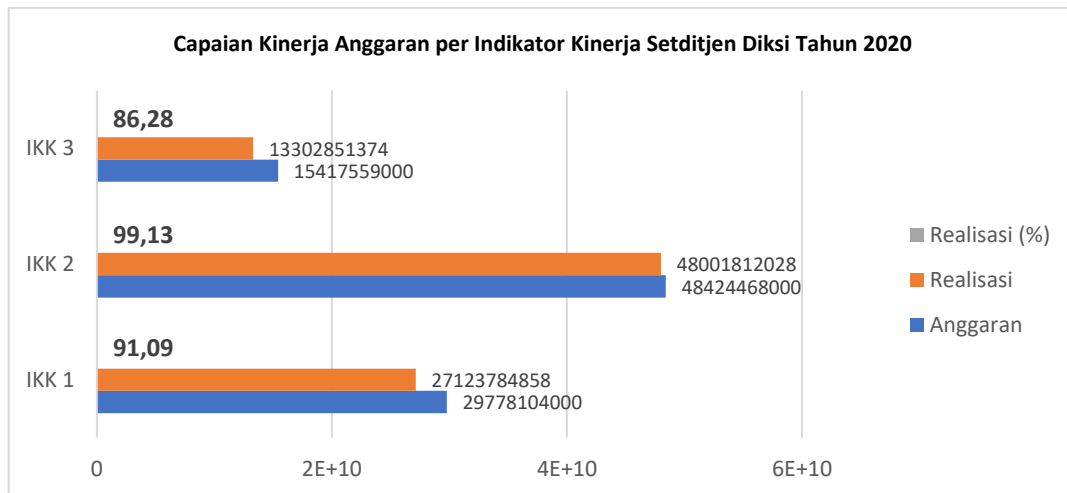
Penyerapan anggaran ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi merupakan satker baru pada tahun 2020.

Pagu anggaran sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 1 Sasaran Strategis dengan 3 Indikator Kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

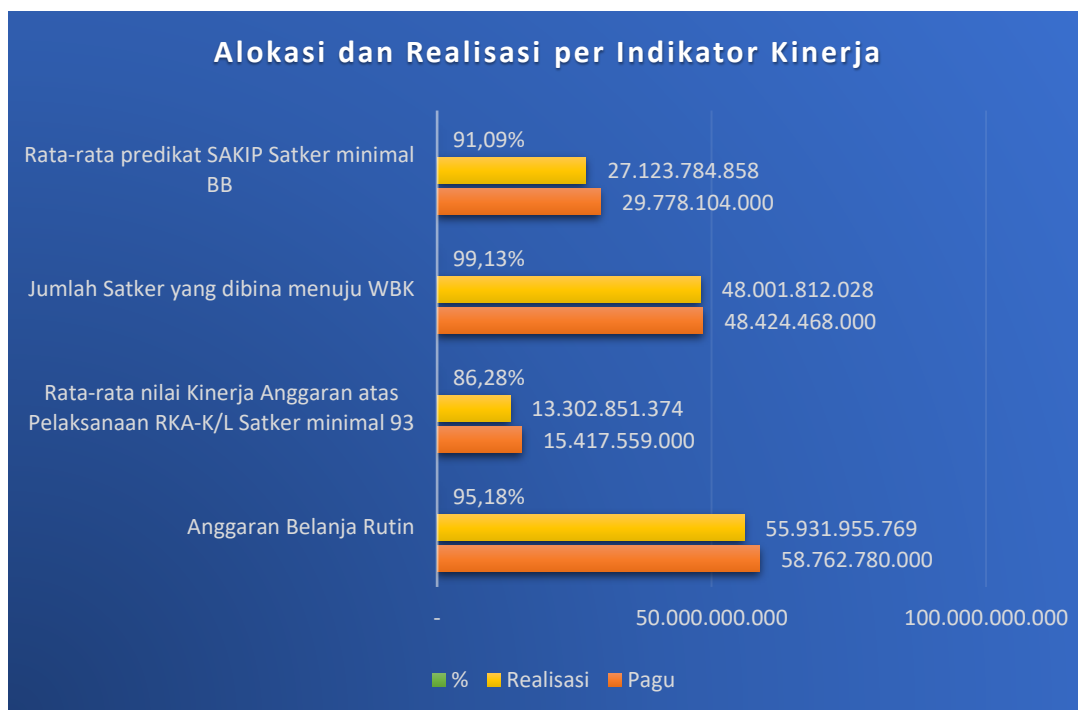


Tabel 8. Realisasi anggaran Setditjen Pendidikan Vokasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Blokir	Realisasi Anggaran	%	Sisa Anggaran	Realisasi Fisik
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	29.778.104.000	0	27.123.784.858	91,09	2.654.319.142	BB
	Jumlah Satker yang dibangun menuju WBK	48.424.468.000	0	48.001.812.028	99,13	422.655.972	13 Satker
	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	15.417.559.000	0	13.302.851.374	86,28	2.114.707.626	95,64
Anggaran Belanja Rutin		58.762.780.000	0	55.931.955.769	95,18	2.830.824.231	1 Layanan
Jumlah		152.382.911.000	0	144.360.404.029	94,74	8.022.506.971	



Gambar 22  
Capaian Anggaran per Indikator Kinerja Setditjen Diksi Tahun 2020

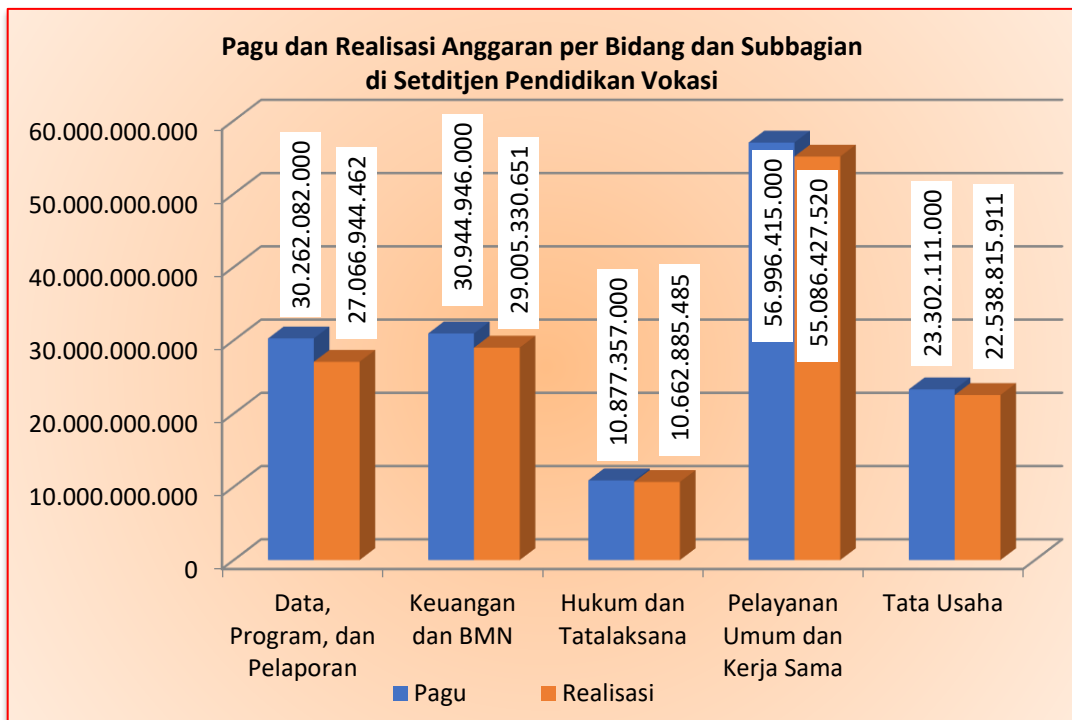


Gambar 23  
Alokasi dan Realisasi anggaran per Indikator Kinerja

Tabel 9. Realisasi anggaran per jenis belanja

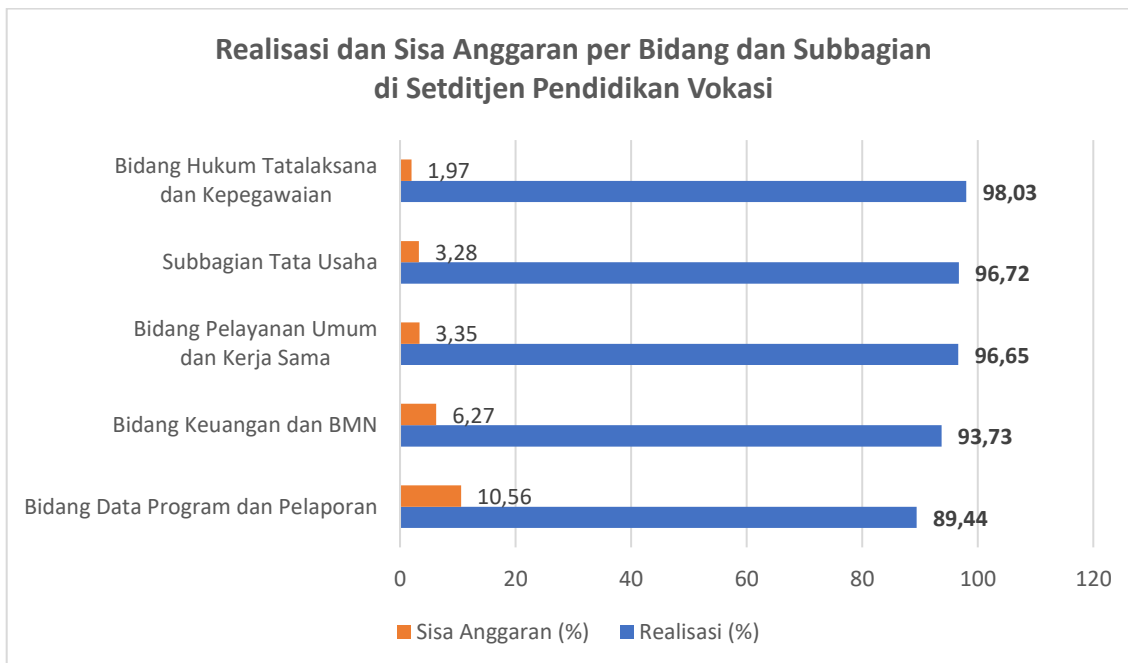
No	Jenis Belanja	Alokasi Anggaran	Blokir	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Belanja Pegawai	8.869.408.000	0	8.184.112.557	92,27	685.295.443
2	Belanja Barang	122.436.865.000	0	115.566.995.272	94,39	27.193.780.748
3	Belanja Modal	21.076.638.000	0	20.609.296.200	97,78	467.341.800
4	Belanja Sosial	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>152.382.911.000</b>	<b>0</b>	<b>144.360.404.029</b>	<b>94,74</b>	<b>8.022.506.971</b>

Realisasi anggaran per Bidang dan Subbagian di Setditjen Pendidikan Vokasi dapat dirinci sebagai berikut:



Gambar 24

Pagu dan Realisasi anggaran per Bidang dan Subbagian di Setditjen Pendidikan Vokasi



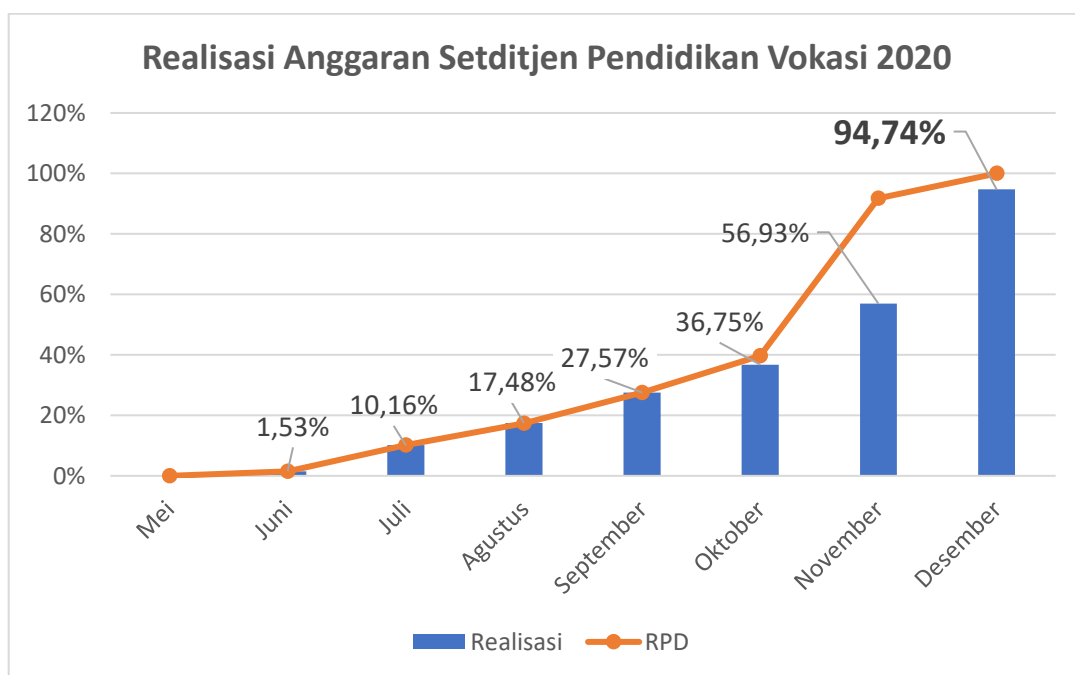
Gambar 25

Realisasi dan Sisa Anggaran per Bidang dan Subbagian di Setditjen Pendidikan Vokasi

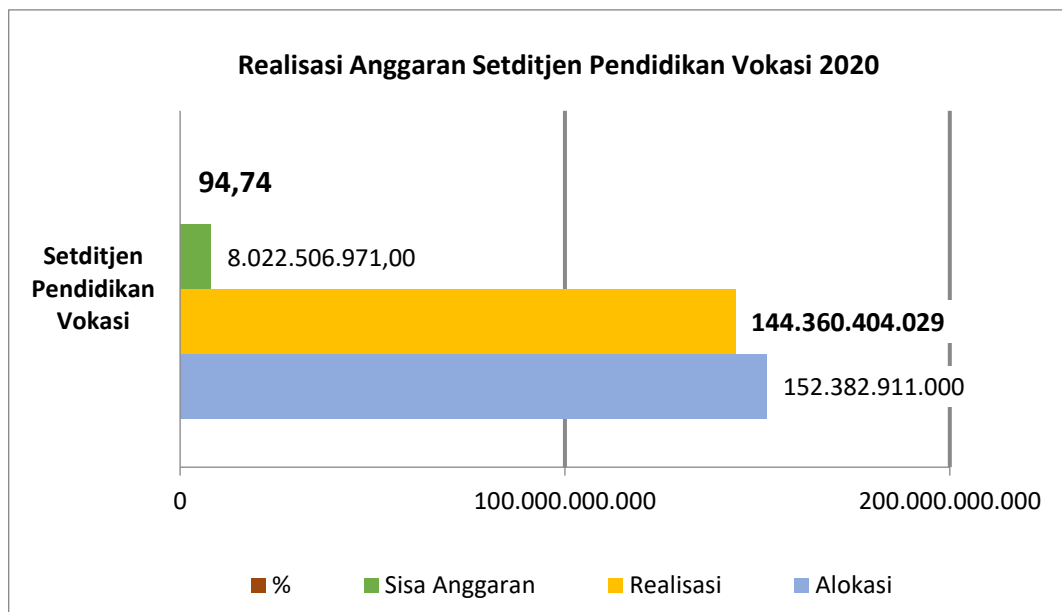
Tabel 10. Pagu dan Realisasi anggaran per Bidang dan Subbagian di Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi

	Alokasi	Realisasi	Sisa Anggaran	%
<b>Bidang Data, Program, dan Pelaporan</b>	30.262.082.000	27.066.944.462	3.195.137.538	89,44
<b>Bidang Keuangan dan BMN</b>	30.944.946.000	29.005.330.651	1.939.615.349	93,73
<b>Bidang Hukum dan Tatalaksana</b>	10.877.357.000	10.662.885.485	214.471.515	98,03
<b>Bidang Pelayanan Umum dan Kerja Sama</b>	56.996.415.000	55.086.427.520	1.909.987.480	96,65
<b>Subbagian Tata Usaha</b>	23.302.111.000	22.538.815.911	763.295.089	96,72
	<b>152.382.911.000</b>	<b>144.360.404.029</b>	<b>8.022.506.971</b>	<b>94,74</b>

Dapat dilihat dari gambar di bawah ini persentase perbandingan pencapaian serapan anggaran Setditjen Pendidikan Vokasi sepanjang tahun 2020 :



**Gambar 26**  
Realisasi anggaran Setditjen Pendidikan Vokasi



*Gambar 27*  
*Realisasi anggaran Setditjen Pendidikan Vokasi*

Anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 8.022.506.971,00 terdiri dari:

1. Anggaran belanja pegawai sebesar Rp 685.295.443,00 karena gaji pegawai untuk bulan Januari 2021 sudah menggunakan DIPA 2021.
2. Sisa anggaran belanja daya dan jasa sebesar RP 2.200.000.000,00 atas penghematan belanja listrik karena adanya pandemi covid-19 yang membuat sebagian pegawai melaksanakan pekerjaan secara daring dari rumah.
3. Sisa anggaran dari berbagai kegiatan lainnya yang tidak terserap.

### **Efisiensi Anggaran**

Pada tahun 2020, Setditjen Pendidikan Vokasi berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 60.052.432.000,00. Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari penyisiran pada belanja barang dan sebagian belanja modal yang direalokasikan untuk penambahan anggaran pada belanja modal dan belanja pegawai.

Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya percepatan daya serap anggaran tahun 2020.



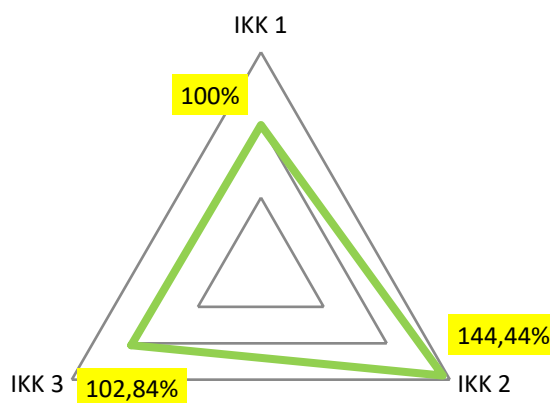


## BAB IV PENUTUP

Selama tahun 2020, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi telah selesai melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Secara umum, kinerja Setditjen Pendidikan Vokasi telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Sampai dengan akhir tahun 2020, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 144.360.404.029,00 (94,74%) dari pagu anggaran sebesar Rp 152.382.911.000,00.

Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan Setditjen Pendidikan Vokasi pada Tahun 2020.

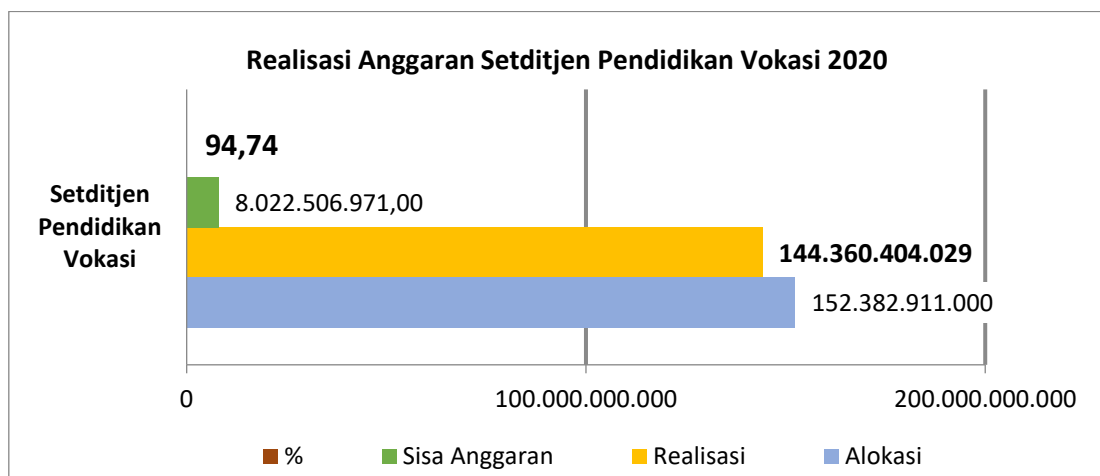


Gambar 28 Persentase Capaian Indikator Kinerja Setditjen Pendidikan Vokasi

Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Setditjen Pendidikan Vokasi

Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi		Target	Realisasi	%
<b>IKK 1</b>	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB	BB	100%
<b>IKK 2</b>	Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	9	13	144,44%
<b>IKK 3</b>	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	93	95,64	102,84%

### Kinerja Keuangan Setditjen Diksi



Gambar 29

Capaian Indikator Kinerja dan Kinerja Keuangan

Dari hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan, ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah:

1. Perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kemendikbud;
2. Adanya pandemi covid-19 yang mengharuskan pegawai untuk bekerja dari rumah dan masuk kantor secara bergantian serta beradaptasi dengan pola kerja yang baru selama masa pandemic covid-19;
3. Perlunya mempertahankan wilayah bebas dari korupsi dan terus meningkatkan tata kelola yang akuntabel dan transparan dalam rangka mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu dilakukan beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain:

1. Terkait upaya untuk mengatasi permasalahan yang dapat menghambat penyerapan anggaran/pencapaian keluaran (output) program, salah satunya dengan cara melibatkan satuan kerja yang berada di bawah koordinasi Setditjen Pendidikan Vokasi dalam memberikan masukan serta melakukan pemecahan masalah;
2. Terus berkoordinasi antar Satuan Kerja yang berkaitan dengan perubahan tata kerja/prosedur kerja dan pemanfaatan memaksimalkan SDM yang ada. Selain itu dilakukan berkoordinasi serta berkolaborasi antar Bidang dalam pelaksanaan program;
3. Mendorong percepatan realisasi pengadaan belanja modal untuk mendongkrak daya serap.

4. Terkait dengan hambatan/permasalahan WBK, maka Setditjen Pendidikan Vokasi melakukan berbagai antisipasi dan pemecahan masalah dengan melakukan koordinasi dan pendampingan dalam mempertahankan dan memperjuangkan sertifikat WBK dengan melibatkan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



# LAMPIRAN



### Dokumen Pengukuran Kinerja Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Blokir	Realisasi Anggaran	%	Sisa Anggaran	Realisasi Fisik
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	29.778.104.000	0	27.123.784.858	91,09	2.654.319.142	BB
	Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	48.424.468.000	0	48.001.812.028	99,13	422.655.972	13 Satker
	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	15.417.559.000	0	13.302.851.374	86,28	2.114.707.626	95,64
Anggaran Belanja Rutin		58.762.780.000	0	55.931.955.769	95.18	2.830.824.231	1 Layanan
Jumlah		152.382.911.000	0	144.360.404.029	94.74	8.022.506.971	





## Perjanjian Kinerja Awal Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi



### Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Henri Tambunan  
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi  
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Wikan Sakarinto, Ph.D.  
Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

(Wikan Sakarinto, Ph.D.)

Jakarta, Juni 2020  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Pendidikan Vokasi

(Dr. Henri Tambunan)



2006261351200

Halaman 1 dari 2





## TARGET KINERJA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi	1.1 Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB
		1.2 Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	satker	9,00
		1.3 Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	nilai	93,00

## KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	212.435.343.000
<b>TOTAL</b>			<b>212.435.343.000</b>

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

(Wikan Sakarinto, Ph.D.)

Jakarta, Juni 2020  
 Sekretaris Direktorat Jenderal  
 Pendidikan Vokasi

(Dr. Henri Tambunan)



2006261351200

Halaman 2 dari 2

## Perjanjian Kinerja Akhir Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi



### Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Henri Tambunan

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi  
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Wikan Sakarinto, Ph.D.

Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

Wikan Sakarinto, Ph.D.

Jakarta, Juni 2020  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Pendidikan Vokasi

Dr. Henri Tambunan



2011300750005



## TARGET KINERJA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi	1.1 Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB
		1.2 Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	satker	9,00
		1.3 Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	nilai	93,00

## KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	152.382.911.000
<b>TOTAL</b>			<b>152.382.911.000</b>

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

(Wikan Sakarinto, Ph.D.)

Jakarta, Juni 2020  
 Sekretaris Direktorat Jenderal  
 Pendidikan Vokasi

(Dr. Henri Tambunan)



2011300750005



## Surat Pernyataan Telah Direviu

PERNYATAAN TELAH DIREVIEU  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI  
TAHUN ANGGARAN 2020

Kami telah mereviu laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk tahun anggaran 2020 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 24 Januari 2021  
Ketua Tim SPI Setditjen  
Pendidikan Vokasi

Saryanti, SE.  
197802132008012017



